

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia atau individu dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun (Zuardin, 1990,81). Untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, individu diharuskan memperoleh pengetahuan melalui suatu interaksi atau hubungan dengan individu lainnya yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan tidak terlepas dari bantuan individu lain untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu keturunan dan lingkungan atau asuhan. Faktor keturunan merupakan faktor yang dimiliki individu sejak dilahirkan dan merupakan faktor genetika dari kedua orang tuanya, seperti jenis kelamin, suku bangsa dan sebagainya yang tidak dapat diubah. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor di luar keturunan yang dapat memengaruhi seorang individu menjadi makhluk sosial di mana lingkungan merupakan tempat dimana individu menjalin interaksi atau hubungan dengan individu atau kelompok lainnya untuk hidup dan mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat.

Sebagai bentuk upaya seorang individu bertahan hidup dan menjadi makhluk sosial yang mampu diterima oleh masyarakat, maka individu

memerlukan banyak pembelajaran dan penyesuaian-penyesuaian tentang segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Aspek-aspek kehidupan yang perlu dipelajari oleh seorang individu dari suatu masyarakat antara lain adalah sikap, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses internalisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kedalam diri individu ini disebut sosialisasi.

Secara umum sosialisasi merupakan proses pengenalan dan pembelajaran nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat oleh seorang individu dengan tujuan agar individu tersebut mampu membaaur dan menyesuaikan diri dalam masyarakat dengan memainkan perannya sendiri. Nilai dan norma sendiri merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, layak, patut, dan pantas bagi kehidupan masyarakat sehingga tercipta suatu keteraturan sosial di dalam masyarakat.

Terbentuknya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan ditaati oleh anggota berperan penting dalam membentuk suatu keteraturan sosial di dalam kelompok sosial masyarakat dan untuk mewujudkan suatu keteraturan sosial tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi nilai dan norma agar nilai dan norma yang berlaku dapat ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

Sosialisasi dapat terjadi dan berlangsung melalui adanya interaksi sosial dalam masyarakat, tanpa adanya interaksi sosial maka sosialisasi tidak akan dapat berlangsung. Menurut Vembrianto (khairuddin, 1985, 76), “Proses sosialisasi merupakan proses akomodasi dimana individu menahan dan mengubah

impus-impus dalam diriya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya”.

Dalam proses sosialisasi, individu mempelajari nilai, norma, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat tersebut kemudian disusun dan dikembangkan dalam diri individu dengan tujuan mewujudkan suatu keteraturan sosial di masyarakat. Karena tanpa adanya sosialisasi individu tidak akan dapat hidup secara selaras dengan lingkungan sosialnya.

Keluarga sebagai agen sosialisasi primer berperan untuk memperkenalkan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya guna menjadi bekal anak untuk memasuki lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga. Sosialisasi nilai dalam keluarga ini bertujuan agar anak mampu berperan dalam setiap lingkungannya sesuai dengan nilai dan norma yang telah orang tua tanamkan pada anak.

Sosialisasi nilai dan norma dalam keluarga dapat membentuk perilaku anak sebagai upaya menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan individu atau kelompok sosial lainnya di luar lingkungan keluarga dimana pada hakikatnya nilai dan norma dibuat untuk ditaati oleh anggota kelompok sosial dalam rangka ketercapaian suatu keteraturan.

Keteraturan sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi nilai dan norma pada anak dalam keluarga ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada

diri anak dalam menaati nilai dan norma yang berlaku diluar keluarga guna membentuk suatu keteraturan sosial.

Selain keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan utama pada diri anak yang mampu mendorong perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga apabila terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan maka akan tercipta suatu keteraturan sosial. Pada kondisi ini sekolah termasuk pada agen sosialisasi sekunder meskipun pada pelaksanaannya sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembentukan serta pembiasaan perilaku anak.

Sekolah memiliki peran dalam memberikan contoh berupa pengalaman kepada siswa agar mampu bersikap sesuai nilai dan norma yang berlaku serta menerapkan nilai dan norma tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dihadapi serta dijalani oleh anak selain lingkungan keluarga. Sekolahpun dianggap sebagai lembaga formal yang berfungsi untuk mendidik anak dalam hal pengajaran pengetahuan melalui pengawasan oleh guru. Didalam lembaga formal sekolah terdiri dari siswa, guru, dan berbagai staf pengajar yang mendukung berjalannya kegiatan sekolah, terdapat suatu aturan yang terbentuk berdasarkan nilai dan norma yang berlaku didalam lingkungan sekolah dimana peraturan ini perlu ditaati oleh seluruh anggota masyarakat sekolah.

Peraturan sekolah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mencapai keteraturan sosial, dimana hal tersebut perlu ditaati oleh seluruh warga sekolah terutama siswa yang termasuk kedalam kelompok individu yang perlu diawasi dan

dibimbing oleh orang dewasa. Salah satu bimbingan tersebut diperoleh dalam agen sosialisasi primer yaitu keluarga melalui proses nilai dan norma. Selain melalui agen sosialisasi primer pihak sekolah selaku agen sosialisasi sekunder memiliki peran dalam membiasakan atau mensosialisasikan peraturan sekolah yang berlaku agar dipatuhi oleh para siswa sebagai wujud dari upaya mencapai keteraturan sosial.

SMA Mekar Arum merupakan salah satu lembaga sosial berbentuk sekolah swasta yang di kelola oleh suatu yayasan yang berada di Jl. Raya Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sekolah ini memiliki peraturan sebagai bentuk realisasi nilai yang berlaku di sekolah. Peraturan sekolah yang berlaku tersebut termasuk kedalam peraturan yang cukup ketat dimana sekolah menuntut siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan apabila terdapat siswa yang melakukan pelanggaran mereka akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya. Sebagai sekolah yang memiliki peraturan dan pengawasan yang ketat dari staf dalam mempertahankan keteraturan sosial yang berlaku disekolah, ketidakteraturan sosial tetap dapat ditemukan diantara siswa SMA Mekar Arum ini.

Berdasarkan realitas dilingkungan sekolah, ketidakteraturan sosial yang berlangsung di SMA Mekar Arum masih terdapatnya pelanggaran pada peraturan yang berlaku disekolah. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain keterlambatan, ketidakhadiran di kelas dan sekolah, ketidaksesuaian baju seragam di sekolah, membawa *hand phone*, alat *make up* dan kegaduhan selama kegiatan belajar

mengajar bukanlah hal yang asing untuk dijumpai di sekolah. Berbagai pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh siswa di sekolah merupakan salah satu faktor pendorong ketidakteraturan sosial. Ketidakteraturan sosial ini merupakan suatu dampak dari ketidaklerlaksanaanya sosialisasi nilai yang direalisasikan dalam bentuk peraturan sekolah dan diterapkan kepada siswa.

Ketidakteraturan sosial tersebut dapat dicegah melalui sosialisasi nilai dalam bentuk penanaman kesadaran pada diri siswa untuk menaati peraturan yang berlaku di sekolah serta sebagai bentuk pembiasaan melalui pemberian contoh teladan pada siswa yang diterapkan selama kegiatan pembelajaran dan kegiatan diluar pembelejaran.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Pelanggaran yang melibatkan siswa masih tergolong kedalam pelanggaran pada batas wajar dimana sekolah dirasa telah mensosialisasikan tata tertib dengan baik. Seorang guru bimbingan konseling mengemukakan bahwa “Tata tertib sekolah sudah dipublikasikan dengan baik secara tertulis dengan dibagikan kepada setiap siswa di tahun pertama, guru pun selalu mengingatkan siswa untuk menaati tata tertib agar tidak mempermalukan nama sekolah dan sebagian besar guru telah memberikan contoh yang baik di sekolah”. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan dari sudut pandang pihak sekolah, mereka telah mensosialisasikan nilai dengan baik, sedangkan menurut beberapa orang siswa kelas XI dan XII mengemukakan “Guru memang mengingatkan untuk taat terhadap tata tertib tapi saya nurutnya tergantung guru yang mengingatkan kalau guru yang saya suka,

saya nurut kalau guru yang *killer* saya nurut hanya di depan gurunya saja”. Hal ini menunjukkan bahwa cara guru dalam mensosialisasikan nilai dalam wujud tata tertib sekolah cenderung berbeda antara satu dan lainnya sehingga sikap siswa yang menaati tata tertib hanyalah suatu pencitraan dihadapan gurunya agar tidak dimarahi dan apabila di belakang gurunya kemungkinan siswa akan bersikap sesuai kemauannya tanpa memperdulikan peringatan dari guru.

Kondisi umum di SMA Mekar Arum menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara cara mensosialisasikan nilai yang dilakukan oleh guru terhadap perilaku siswa dalam bersosialisasi di sekolah, baik kepada guru maupun siswa sebagai temannya yang diwujudkan melalui ketaatan siswa serta perilakunya sehari-hari di lingkungan sekolah.

Kondisi SMA Mekar Arum dapat digambarkan dalam prinsip utama dari teori Fungsionalisme struktural yang menekankan pada keberhasilan suatu sistem dapat terjadi apabila setiap sub sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga membentuk keteraturan dengan mempertahankan konsensus umum (Adi, 2012:93). Apabila dipaparkan dalam kondisi umum di SMA Mekar Arum maka sekolah adalah suatu sistem kesatuan yang terdiri dari berbagai sub sistem yaitu siswa, guru, dan seluruh warga sekolah di mana suatu keberhasilan atau keteraturan sosial dapat terlaksana di sekolah apabila seluruh warga sekolah dapat bersikap dan berperilaku sesuai fungsi dan peranannya masing-masing tanpa mengganggu keberlangsungan sub sistem lainnya.

Sosialisasi nilai di sekolah memiliki peran dalam menciptakan keteraturan sosial di mana setiap guru memiliki pola sosialisasi yang berbeda dalam mendidik siswa di SMA Mekar Arum masih terdapat berbagai macam ketidakteraturan sosial yang melibatkan siswa di mana pada dasarnya setiap individu memiliki kesadaran moral untuk menaati norma atau aturan yang berlaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini didukung oleh kenyataan bahwa ketercapaian keteraturan sosial di sekolah hanya dapat tercapai apabila setiap warga sekolah bersikap dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara tepat. Sebagai upaya untuk mengatasi ketidakteraturan sosial yang berlangsung di sekolah maka diperlukan suatu kajian untuk membahas mengenai peran sosialisasi nilai di sekolah untuk menciptakan keteraturan sosial di sekolah serta analisis ketidak teraturan dan keteraturan sosial para siswa di sekolah dilihat dari pola sosialisasi nilai yang melibatkan guru. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai dampak pola sosialisasi oleh guru di sekolah pada perilaku anak selaku siswa di sekolah melalui penelitian tentang “Peran Sosialisasi Nilai dan Norma dalam Upaya Menciptakan Keteraturan Sosial di Sekolah (Studi Deskriptif Peran Sosialisasi Nilai Pada Siswa SMA Mekar Arum Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dan penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah, yang tujuannya agar mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian (Usman dan Akbar, 2011:18-19). Sebelum melakukan penelitian tersebut, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi masalah penelitian tersebut.

Ketercapaian keteraturan sosial di sekolah hanya dapat tercapai apabila setiap warga sekolah bersikap dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara tepat. Namun pada kenyataannya terjadi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan di sekolah akibat tidak berperilaku sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Ketidakteraturan ini terjadi akibat sosialisasi nilai di sekolah belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tidak berjalannya peraturan di sekolah ini yang kemudian menyebabkan adanya pelanggaran.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sosialisasi nilai dan norma dalam lingkungan sekolah pada siswa SMA Mekar Arum?
2. Bagaimana keteraturan sosial warga sekolah SMA Mekar Arum?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat pihak sekolah untuk menciptakan keteraturan sosial di SMA Mekar Arum?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sosialisasi nilai dalam lingkungan sekolah SMA Mekar Arum pada siswanya.
2. Untuk mengetahui keteraturan sosial warga sekolah di SMA Mekar Arum.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pihak sekolah untuk menciptakan keteraturan sosial di SMA Mekar Arum.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, kegunaan atau mamfaat yang diharapkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan keilmuan sosiologi khususnya Sosiologi Pendidikan. Dan dapat menjadi rujukan ilmiah untuk menambah khasanah intelektual di kalangan masyarakat akademisi sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan suatu teori.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis ditujukan bagi Sekolah SMA Mekar Arum dalam hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk lebih meningkatkan kesadaran diri pada setiap pengajar bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar tetapi mendidik oleh karena itu guru menjadi seorang

panutan, dan mengajak untuk lebih baik lagi dalam mensosialisasikan nilai kepada peserta didik agar terciptanya keteraturan sosial di sekolah. Sedangkan bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil dari penelitian itu sendiri diharapkan dapat lebih memantapkan fungsi keilmuan yang dipelajari.

1.6. Kerangka Pemikiran

Teori Fungsionalisme Struktural yang dicetuskan oleh Talcot Parson menekankan pada suatu keteraturan sosial. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian tertentu yang saling berkaitan antara satu sama lainnya untuk mencapai suatu keseimbangan berupa keteraturan sosial. Menurut (Marzali, 2006: 128) “tujuan kajian-kajian struktural fungsionalisme adalah membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara individu-kelompok, antara kelompok-kelompok di dalam suatu masyarakat.

Secara sederhana, teori fungsionalisme menekankan pada suatu keyakinan terhadap keberlangsungan suatu sistem yang memandang bahwa fakta sosial memiliki kerapuhan antar hubungan dan keteraturan yang sama dengan yang dipertahankan konsensus umum. Sehingga apabila masyarakat menjalankan fungsi dan peranannya yang sesuai dengan harapan masyarakat maka akan terbentuk suatu keteraturan sosial (Martono, 2014:58).

Berdasarkan teori fungsionalisme struktural ini, terdapat empat fungsi imperatif dari segala bentuk sistem tindakan. Menurut Rocher (Ritzer, 2012:408) menyatakan bahwa fungsi teori fungsionalisme struktural adalah “suatu kompleks

kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem-sistem itu”. kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah berbagai cara dan upaya yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat selaku sub sistem untuk mendukung keberlangsungan fungsi masyarakat sebagai suatu kesatuan atau sistem sehingga segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Menurut Parson (Ritzer, 2012:408-410), menyatakan bahwa empat imperatif fungsional tersebut dapat disebut sebagai AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), yaitu: 1) adaptasi, suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya; 2) pencapaian tujuan, suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; 3) integrasi, suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan diantara tiga imperative fungsional lainnya; dan 4) latensi (pemeliharaan pola), suatu sistem harus menyediakan, memelihara dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Keberfungsian teori fungsionalisme struktural di masyarakat ini akan mendorong ketercapaian tujuan yang perlu dicapai di masyarakat. Salah satu bentuk ketercapaian tujuan dari teori fungsionalisme struktural yang diterapkan ditengah masyarakat adalah terciptanya keteraturan sosial di mana individu sebagai anggota masyarakat dituntut untuk beradaptasi menyesuaikan diri

dengan peraturan yang berlaku ditengah masyarakat untuk mencapai tujuan keteraturan sosial melalui integrasi dan seluruh sistem yang mengontrol setiap tindakan anggota masyarakat melalui keberadaan sanksi dan penguatan serta apabila ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku telah terlaksana dengan baik dan mulai menjadi pola yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan maka perlu dipelihara melalui latensi.

Tindakan preventif merupakan suatu tindakan sebagai upaya pencegahan yang dilakukan agar suatu pelanggaran tidak terjadi. Di bandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya pelanggaran upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana pelanggaran tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan agar pelanggaran itu tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi.

Menurut Kumanto Sunarto (Damsar, 2012:68) memaparkan bahwa sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk yaitu sosialisasi represif (*repressive socialization*) dan sosialisasi partisipatif (*participatory socialization*).

1. Sosialisasi Represif

Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang lebih menekankan penggunaan hukuman, terutama hukuman fisik terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Adapun ciri-ciri sosialisasi represif diantaranya: menghukum perilaku yang keliru, adanya hukuman dan imbalan materiil, kapa tuhan anak

kapada orang tua, perintah sebagai komunikasi, komunikasi nonverbal dan komunikasi satu arah yang berasal dari orang tua, sosialisasi berpusat pada orang tua, anak memerhatikan harapan orang tua, dalam keluarga biasanya didominasi orang tua.

2. Sosialisasi Partisipatif

Pola ini lebih menekankan pada interaksi anak yang menjadi pusat sosialisasi. Dalam pola ini, bahasa merupakan sarana yang paling baik sebagai alat untuk membentuk hati nurani seseorang dan berbagai perantara dalam pengembangan diri. Melalui bahasa, seseorang belajar berkomunikasi, belajar berpikir, dan mengenal diri. Sosialisasi partisipatif memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan imbalan bagi perilaku baik.
2. Hukuman dan imbalan bersifat simbolis.
3. Otonomi anak.
4. Interaksi sebagai komunikasi.
5. Komunikasi verbal atau komunikasi dua arah, baik dari anak maupun orang tua.
6. Sosialisasi berpusat pada anak.
7. Orang tua memerhatikan keinginan anak.
8. Dalam keluarga biasanya mempunyai tujuan yang sama.

Keteraturan sosial dapat tercipta dalam kehidupan masyarakat apabila telah terpenuhinya unsur-unsur tertib sosial, order, keajegan, dan pola (Muin, 2013: 75-76).

1. Tertib Sosial (*Social Order*)

Tertib sosial adalah kondisi kehidupan kelompok yang aman, dinamis teratur, yang ditandai dengan masing-masing anggota kelompok menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik sesuai dengan status dan peranannya. Tertib sosial memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas. Sebuah sistem bisa didefinisikan sebagai sebuah perbedaan dari interaksi individu-individu dengan yang lainnya berdasarkan pembagian norma dan arti.
- 2) Individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- 3) Individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

2. Order

Order sering disebut perintah atau pesan. Order merupakan suatu sistem norma dan nilai yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Order menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah atau pesan untuk melakukan

sesuatu. Dalam sosiologi, order adalah mengakui dan mematuhi sistem nilai, norma yang berkembang dalam kelompok.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan order yaitu:

- 1) Kepatuhan (*Compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas.
- 2) Pelanggaran (*Deviance*), pelanggaran dianggap sebagai status sosial atau kategori yang terkadang memaksa, mengubah hubungan sosial pelaku terhadap lainnya.
- 3) Sanksi (Kontrol sosial), sanksi-sanksi sosial dilakukan melalui tekanan-tekanan sosial terhadap individu-individu dalam interaksi sehari-hari.

3. Keajegan

Keajegan adalah suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus menerus. Keajegan juga bisa diartikan gambaran tentang suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma, dan nilai dalam interaksi sosial. Keajegan dapat tercapai apabila order yang telah ada tetap terjaga dan terpelihara demi memperoleh kepastian hukum.

4. Pola

Pola merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang mencerminkan kondisi status sosial seseorang. Pola juga bisa diartikan sebagai gambaran tentang corak, mode, sistem atau struktur yang tetap dalam interaksi sosial.

Gambar 1.1
Skema Konseptual

”Peran Sosialisasi Nilai dalam Upaya Menciptkan Keteraturan Sosial Di Sekolah”

